



Perancangan Kurikulum dan Silabus PPKn Berbasis Pendidikan Karakter

M. Thoha, Rifa'i

Program Studi Magister Pedagogi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
mthoha10@gmail.com, rifa'i@umb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perancangan kurikulum dan silabus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbasis pendidikan karakter sebagai upaya penguatan pembentukan warga negara yang berintegritas dan berkepribadian Pancasila. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter moral yang kuat di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta dokumen kebijakan pendidikan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Merdeka, dan Profil Pelajar Pancasila. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis konten untuk mengidentifikasi konsep, pola, dan tema utama terkait integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum dan silabus PPKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual Standar Kompetensi dan Capaian Pembelajaran PPKn telah memuat nilai-nilai Pancasila dan kompetensi kewarganegaraan, namun implementasinya masih cenderung berorientasi kognitif. Integrasi Profil Pelajar Pancasila belum sepenuhnya teroperasionalisasi dalam aktivitas pembelajaran dan penilaian. Pengembangan silabus PPKn berbasis proyek kewarganegaraan dinilai efektif dalam mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perancangan kurikulum dan silabus PPKn berbasis pendidikan karakter perlu dilakukan secara sistematis, kontekstual, dan berorientasi pada pengalaman belajar autentik untuk memperkuat karakter kebangsaan peserta didik.

Kata kunci: Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Perancangan Kurikulum, Pengembangan Silabus

1. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat dan bermoral. Pendidikan karakter menjadi fondasi penting dalam pendidikan modern karena berfungsi menanamkan nilai moral, etika, dan sosial yang dibutuhkan peserta didik untuk menghadapi dinamika kehidupan global. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat telah membawa tantangan serius berupa degradasi nilai moral, melemahnya nasionalisme, meningkatnya individualisme, serta menurunnya kepedulian sosial generasi muda. Kondisi tersebut menuntut sistem pendidikan untuk tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik secara holistik dan berkelanjutan sebagai bekal kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Lickona, 2021).

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sejalan dengan tujuan tersebut, pendidikan karakter diposisikan sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, semangat kebangsaan, serta kesadaran berkonstitusi sejak dini. Implementasi pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional dipandang sebagai strategi fundamental untuk membangun generasi yang berintegritas dan berkepribadian bangsa di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Dalam implementasinya, pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari peran kurikulum sebagai pedoman utama penyelenggaraan pembelajaran. Kurikulum yang dirancang secara sistematis dan kontekstual mampu mengarahkan tujuan, isi, metode, serta evaluasi pembelajaran agar selaras dengan nilai-nilai karakter yang ingin

dikembangkan. Oleh karena itu, perancangan kurikulum dan silabus berbasis pendidikan karakter menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mendorong internalisasi nilai, pembentukan sikap, dan pengembangan perilaku positif peserta didik secara berkesinambungan (Prihantini, 2023).

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi strategis dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah. PPKn tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga sebagai wahana pembentukan sikap, nilai, dan perilaku warga negara yang berkarakter. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik diharapkan mampu menginternalisasi nilai moral, etika, demokrasi, toleransi, keadilan, tanggung jawab, serta cinta tanah air sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Winarno, 2022).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah kurikulum dan silabus PPKn yang belum dirancang secara integratif berbasis pendidikan karakter. Pembelajaran PPKn cenderung menitikberatkan pada aspek kognitif dan penguasaan materi, sementara aspek afektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan pembentukan karakter belum mendapatkan perhatian optimal. Selain itu, silabus yang digunakan sering kali bersifat administratif dan belum secara eksplisit memuat integrasi nilai-nilai karakter dalam tujuan pembelajaran, materi, metode, maupun sistem penilaian (Suyanto & Jihad, 2021).

Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya peran PPKn dalam membentuk karakter peserta didik. Nilai-nilai karakter yang seharusnya menjadi ruh pembelajaran PPKn belum sepenuhnya terinternalisasi secara bermakna dalam perilaku peserta didik. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya perilaku yang kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti rendahnya disiplin, lemahnya tanggung jawab, rendahnya toleransi, serta minimnya kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kebangsaan (Purba, 2024).

Selain kurikulum dan silabus, keberhasilan pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn juga sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kontekstual, dan berbasis pengalaman nyata dinilai lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter dibandingkan pendekatan konvensional yang bersifat ceramah. Melalui kegiatan diskusi, studi kasus, simulasi, dan proyek kewarganegaraan, peserta didik dapat belajar mengaitkan konsep PPKn dengan realitas sosial di sekitarnya, sehingga nilai-nilai karakter tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga dialami dan dipraktikkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2022).

Di samping strategi pembelajaran, sistem penilaian juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi pendidikan karakter dalam PPKn. Penilaian pembelajaran PPKn tidak seharusnya hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga perlu mencakup penilaian sikap dan perilaku peserta didik secara autentik dan berkelanjutan. Penilaian autentik yang dirancang secara sistematis dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan karakter peserta didik, seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan sikap demokratis, sehingga proses pembelajaran benar-benar berorientasi pada pembentukan karakter secara menyeluruh (Mueller, 2021).

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, penerapan Kurikulum Merdeka semakin menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter melalui pengembangan Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila menekankan enam dimensi utama yang menjadi arah pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan pembelajaran PPKn, sehingga perancangan kurikulum dan silabus PPKn perlu diselaraskan secara sistematis agar pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna (Kemendikbudristek, 2023).

Lebih lanjut, perancangan kurikulum dan silabus PPKn berbasis pendidikan karakter juga perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan lingkungan peserta didik. Kurikulum yang kontekstual memungkinkan nilai-nilai karakter Pancasila diintegrasikan dengan kearifan lokal dan realitas sosial masyarakat sekitar sekolah. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membantu peserta didik menginternalisasi nilai kebangsaan secara nyata dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Tilaar, 2021).

Dengan demikian, perancangan kurikulum dan silabus PPKn berbasis pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran PPKn dapat berfungsi secara optimal sebagai wahana pembentukan warga negara yang berkarakter, berintegritas, dan berkepribadian Pancasila. Perancangan yang terencana dan kontekstual

diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan di satuan pendidikan (Winarno & Suyahmo, 2024).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis secara mendalam konsep, teori, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perancangan kurikulum dan silabus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbasis pendidikan karakter. Melalui studi kepustakaan, peneliti berupaya memperoleh pemahaman komprehensif mengenai landasan filosofis, yuridis, dan pedagogis pendidikan karakter serta relevansinya dalam pengembangan kurikulum dan silabus PPKn di satuan pendidikan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik yang relevan, meliputi buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding seminar, serta dokumen resmi kebijakan pendidikan. Dokumen kebijakan tersebut mencakup Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan Kurikulum Merdeka, Profil Pelajar Pancasila, serta pedoman pembelajaran PPKn yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan tingkat kredibilitas, kebaruan publikasi, dan kesesuaian dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan berbagai dokumen tertulis yang berkaitan langsung dengan perancangan kurikulum dan silabus PPKn berbasis pendidikan karakter. Dokumen yang dikaji meliputi struktur kurikulum, capaian pembelajaran PPKn, tujuan pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran, serta sistem penilaian yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui tahapan penelusuran literatur, identifikasi dokumen relevan, seleksi sumber, dan pencatatan informasi penting ke dalam format catatan penelitian.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah konsep dan model perancangan kurikulum serta silabus PPKn yang berorientasi pada pendidikan karakter. Fokus analisis diarahkan pada integrasi nilai-nilai karakter Pancasila dalam komponen kurikulum dan silabus, meliputi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji keselarasan antara kurikulum dan silabus PPKn dengan kebijakan pendidikan nasional, khususnya Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*). Analisis konten dilakukan dengan cara membaca secara kritis, mengkategorikan, mengorganisasi, dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber pustaka. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep utama terkait pendidikan karakter dan implementasinya dalam kurikulum serta silabus PPKn. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam merumuskan desain konseptual kurikulum dan silabus PPKn berbasis pendidikan karakter.

Dalam proses analisis, peneliti melakukan tahap reduksi data dengan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian dan mengeliminasi data yang tidak sesuai. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan tematik, seperti tema nilai-nilai karakter, struktur silabus PPKn, pendekatan pembelajaran, serta model penilaian karakter. Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan yang menggambarkan prinsip dan langkah perancangan kurikulum serta silabus PPKn berbasis pendidikan karakter.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang kredibel. Dengan demikian, hasil analisis memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai perancangan kurikulum dan silabus PPKn berbasis pendidikan karakter. Melalui pendekatan studi kepustakaan dan analisis yang kritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan konsep pengembangan kurikulum PPKn, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi perancangan kurikulum dan silabus yang relevan dengan kebutuhan pendidikan karakter di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

A. Analisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PPKn

Hasil analisis terhadap Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) atau Capaian Pembelajaran (CP) PPKn menunjukkan bahwa secara konseptual PPKn telah dirancang untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan peserta didik yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Struktur kompetensi PPKn memuat muatan nilai Pancasila, konstitusi, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta kebhinekaan sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa dalam implementasinya, kompetensi tersebut masih lebih dominan diarahkan pada penguasaan pengetahuan konseptual dibandingkan pengembangan sikap dan karakter peserta didik secara kontekstual (Winarno, 2022).

Lebih lanjut, analisis dokumen kurikulum menunjukkan bahwa rumusan kompetensi PPKn belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam indikator pembelajaran yang operasional dan terukur dalam konteks pendidikan karakter. Kompetensi sikap sering kali dirumuskan secara normatif tanpa disertai strategi pembelajaran dan penilaian yang mampu mengukur internalisasi nilai secara autentik. Hal ini berdampak pada kesenjangan antara tujuan ideal PPKn sebagai wahana pembentukan karakter dan praktik pembelajaran di kelas yang masih berorientasi pada aspek kognitif (Suyanto & Jihad, 2021).

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa perancangan kurikulum PPKn perlu menekankan keselarasan antara standar kompetensi, materi pembelajaran, dan penilaian berbasis karakter. Kurikulum yang efektif adalah kurikulum yang mampu menjabarkan nilai-nilai karakter ke dalam pengalaman belajar nyata dan relevan dengan kehidupan peserta didik (Prihantini, 2023).

B. Implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam PPKn

Hasil kajian menunjukkan bahwa Profil Pelajar Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tujuan pembelajaran PPKn. Enam dimensi Profil Pelajar Pancasila—beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif—secara substansial selaras dengan kompetensi kewarganegaraan yang dikembangkan dalam PPKn. PPKn menjadi mata pelajaran strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut karena memuat dimensi moral, sosial, dan politik secara terpadu (Kemendikbudristek, 2022).

Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam pembelajaran PPKn belum sepenuhnya optimal. Integrasi profil tersebut masih terbatas pada tataran perencanaan administratif, seperti pencantuman dimensi profil dalam dokumen modul ajar, tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam aktivitas pembelajaran dan asesmen. Guru cenderung mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkan dimensi Profil Pelajar Pancasila ke dalam kegiatan belajar yang konkret dan bermakna bagi peserta didik (Setyowati & Sutikno, 2024).

Diskusi ini menegaskan bahwa implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam PPKn memerlukan perancangan kurikulum dan silabus yang lebih eksplisit dan terstruktur. Nilai-nilai profil perlu diterjemahkan ke dalam tujuan pembelajaran, aktivitas belajar, serta indikator penilaian yang jelas agar penguatan karakter peserta didik dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan (Kemendikbudristek, 2023).

C. Pengembangan Silabus PPKn Berbasis Proyek Kewarganegaraan

Hasil kajian terhadap berbagai model pembelajaran menunjukkan bahwa pengembangan silabus PPKn berbasis proyek kewarganegaraan (*civic project*) memiliki potensi besar dalam memperkuat pendidikan karakter. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi masalah sosial, merumuskan solusi, serta merefleksikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks nyata. Model ini dinilai efektif dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab, kepedulian sosial, kerja sama, dan partisipasi demokratis (Sanjaya, 2022).

Analisis silabus menunjukkan bahwa silabus PPKn yang berbasis proyek kewarganegaraan mampu mengintegrasikan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara lebih seimbang. Melalui proyek kewarganegaraan, peserta didik tidak hanya mempelajari konsep Pancasila dan demokrasi, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, silabus berbasis proyek menjadi sarana

strategis untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik pendidikan karakter (Winarno & Suyahmo, 2024).

Diskusi ini menguatkan pandangan bahwa pengembangan silabus PPKn perlu diarahkan pada pembelajaran autentik dan kontekstual. Proyek kewarganegaraan dapat menjadi wahana implementasi nilai-nilai karakter yang relevan dengan tantangan sosial peserta didik, sehingga pembelajaran PPKn tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif (OECD, 2021).

D. Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran PPKn

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan inti dari pendidikan karakter dalam PPKn. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam pembentukan sikap dan perilaku warga negara yang berkarakter. Integrasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran PPKn perlu dilakukan secara holistik melalui materi ajar, metode pembelajaran, serta penilaian yang berorientasi pada pengembangan karakter (Lickona, 2021).

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn masih sering dilakukan secara simbolik dan verbalistik. Nilai Pancasila lebih banyak disampaikan dalam bentuk hafalan dan pengetahuan konseptual, tanpa diikuti dengan pembiasaan dan refleksi kritis dalam kehidupan peserta didik. Hal ini menyebabkan internalisasi nilai belum berlangsung secara mendalam dan berkelanjutan (Tilaar, 2021).

Diskusi ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn memerlukan pendekatan pedagogis yang menekankan pengalaman, keteladanan, dan refleksi. Pembelajaran yang mengaitkan nilai Pancasila dengan realitas sosial peserta didik akan lebih efektif dalam membentuk karakter kebangsaan yang autentik dan kontekstual (Purba, 2024).

Diskusi

Hasil analisis terhadap Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) atau Capaian Pembelajaran (CP) PPKn menunjukkan bahwa secara konseptual mata pelajaran PPKn telah dirancang untuk membentuk kompetensi kewarganegaraan peserta didik secara holistik, mencakup dimensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Muatan nilai Pancasila, konstitusi, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta kebhinekaan telah terintegrasi dalam struktur kompetensi sebagai fondasi utama pembentukan karakter kebangsaan. Namun, dalam praktiknya, orientasi pembelajaran PPKn masih cenderung menitikberatkan pada penguasaan aspek kognitif dibandingkan pengembangan sikap dan karakter secara kontekstual, sehingga tujuan pendidikan karakter belum sepenuhnya tercapai secara optimal (Winarno, 2022).

Lebih lanjut, kajian terhadap dokumen kurikulum menunjukkan bahwa rumusan kompetensi PPKn belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam indikator pembelajaran yang operasional, terukur, dan aplikatif dalam konteks pendidikan karakter. Kompetensi sikap sering kali disajikan secara normatif dan umum, tanpa disertai panduan strategi pembelajaran dan penilaian autentik yang mampu mengukur internalisasi nilai secara nyata dalam perilaku peserta didik. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan ideal PPKn sebagai wahana pembentukan karakter dengan praktik pembelajaran di kelas yang masih berorientasi pada hafalan konsep dan pencapaian nilai akademik semata (Suyanto & Jihad, 2021).

Temuan tersebut menguatkan pandangan bahwa perancangan kurikulum PPKn perlu menekankan keterpaduan antara standar kompetensi, materi pembelajaran, metode, serta sistem penilaian berbasis karakter. Kurikulum yang efektif tidak hanya merumuskan nilai karakter secara tekstual, tetapi mampu mengimplementasikannya dalam pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Dengan demikian, kurikulum PPKn harus dirancang sebagai instrumen pedagogis yang mendorong pembentukan karakter melalui proses pembelajaran yang aktif, reflektif, dan kontekstual (Prihantini, 2023).

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, kehadiran Profil Pelajar Pancasila memperkuat posisi PPKn sebagai mata pelajaran strategis dalam pendidikan karakter. Enam dimensi Profil Pelajar Pancasila memiliki keselarasan substansial dengan tujuan PPKn, terutama dalam membentuk peserta didik yang beriman, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. PPKn berperan sebagai wahana integratif yang

menghubungkan dimensi moral, sosial, dan politik dalam pembelajaran kewarganegaraan yang berorientasi pada pembentukan karakter bangsa (Kemendikbudristek, 2022).

Namun demikian, hasil diskusi menunjukkan bahwa implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam pembelajaran PPKn masih menghadapi berbagai tantangan. Integrasi profil tersebut sering kali terbatas pada tataran administratif, seperti pencantuman dimensi profil dalam modul ajar atau RPP, tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam aktivitas pembelajaran dan asesmen. Guru masih mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkan dimensi Profil Pelajar Pancasila menjadi kegiatan belajar yang konkret, terukur, dan berdampak langsung terhadap pembentukan karakter peserta didik (Setyowati & Sutikno, 2024).

Oleh karena itu, implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam PPKn memerlukan perancangan kurikulum dan silabus yang lebih sistematis dan eksplisit. Nilai-nilai profil harus diterjemahkan ke dalam tujuan pembelajaran, skenario aktivitas belajar, serta indikator penilaian yang jelas dan konsisten. Dengan perancangan yang terstruktur, PPKn dapat menjadi sarana strategis dalam memperkuat pendidikan karakter secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam proses pembelajaran sehari-hari (Kemendikbudristek, 2023).

Pengembangan silabus PPKn berbasis proyek kewarganegaraan (*civic project*) juga menjadi temuan penting dalam diskusi ini. Pembelajaran berbasis proyek memberikan ruang bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam mengidentifikasi permasalahan sosial, merumuskan solusi, serta merefleksikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks kehidupan nyata. Model ini dinilai efektif dalam menumbuhkan karakter tanggung jawab, kepedulian sosial, kerja sama, dan partisipasi demokratis, yang merupakan inti dari pendidikan karakter dalam PPKn (Sanjaya, 2022).

Analisis menunjukkan bahwa silabus PPKn berbasis proyek kewarganegaraan mampu mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara lebih seimbang. Peserta didik tidak hanya memahami konsep Pancasila dan demokrasi secara teoritis, tetapi juga mempraktikkannya melalui pengalaman belajar autentik. Dengan demikian, silabus berbasis proyek menjadi jembatan yang efektif antara teori kewarganegaraan dan praktik pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari peserta didik (Winarno & Suyahmo, 2024).

Pada akhirnya, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn merupakan inti dari perancangan kurikulum berbasis pendidikan karakter. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus diinternalisasikan secara holistik melalui materi ajar, metode pembelajaran, keteladanan guru, serta penilaian reflektif. Pembelajaran yang mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan realitas sosial peserta didik akan lebih efektif dalam membentuk karakter kebangsaan yang autentik, kontekstual, dan berkelanjutan (Lickona, 2021; Tilaar, 2021; Purba, 2024).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perancangan kurikulum dan silabus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbasis pendidikan karakter merupakan kebutuhan yang bersifat strategis dan mendesak dalam rangka membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila. Secara konseptual, struktur kurikulum PPKn, baik dalam bentuk Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, maupun Capaian Pembelajaran, telah memuat nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, konstitutionalisme, dan karakter Pancasila sebagai fondasi pembentukan kepribadian peserta didik. Namun demikian, implementasi pembelajaran PPKn di satuan pendidikan masih cenderung didominasi oleh pendekatan kognitif, sehingga pengembangan sikap, nilai, dan karakter belum terinternalisasi secara optimal dan berkelanjutan dalam perilaku peserta didik. Integrasi Profil Pelajar Pancasila dalam pembelajaran PPKn pada dasarnya memiliki keselarasan yang kuat dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi profil tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya teroperasionalisasi dalam aktivitas pembelajaran, strategi pedagogis, serta sistem penilaian. Oleh karena itu, diperlukan perancangan kurikulum dan silabus PPKn yang lebih eksplisit, sistematis, dan aplikatif agar dimensi Profil Pelajar Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dan bermakna dalam proses pembelajaran. Selain itu, pengembangan silabus PPKn berbasis proyek kewarganegaraan terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik pendidikan karakter. Pembelajaran berbasis proyek memberikan pengalaman belajar autentik yang mendorong peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila melalui keterlibatan aktif dalam pemecahan masalah sosial dan kehidupan demokratis. Dengan demikian, kurikulum dan silabus PPKn perlu dirancang secara terintegrasi, kontekstual, dan berorientasi pada pengalaman belajar nyata agar mampu membentuk peserta didik yang berintegritas, bertanggung jawab, demokratis, serta berkepribadian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Referensi

1. Kemendikbudristek. (2022). *Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Kemendikbudristek. (2023). *Kurikulum Merdeka dan Implementasi Pembelajaran*. Jakarta: Kemendikbudristek.
3. Lickona, T. (2021). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
4. Mueller, J. (2021). *Authentic Assessment Toolbox*. North Central College.
5. OECD. (2021). *Global Citizenship Education and Civic Engagement*. Paris: OECD Publishing.
6. Prihantini. (2023). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter*. Bandung: Alfabeta.
7. Purba, R. (2024). Pendidikan karakter Pancasila dalam pembelajaran PPKn. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1), 45–58.
8. Sanjaya, W. (2022). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
9. Setyowati, E., & Sutikno. (2024). Implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam PPKn. *Jurnal Civic Education*, 9(2), 101–115.
10. Suyanto, & Jihad, A. (2021). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
11. Tilaar, H. A. R. (2021). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
12. Winarno. (2022). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
13. Winarno, & Suyahmo. (2024). Civic project sebagai model penguatan karakter. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 11(1), 1–14.
14. World Bank. (2022). *Socioeconomic barriers to schooling*.
15. Wulandari, S. (2022). Faktor ekonomi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2), 122–138.